

MENGERAKKAN DENYUT NADI KOPERASI WANITA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Gunari Budhiretnowati* dan Rapma Siahaan**

Abstrak

Tantangan kopwan dalam menghadapi era globalisasi antara lain : 1). Keterbatasan informasi pasar dan teknologi; 2). kendala dalam akses permodalan; 3). kapasitas SDM perempuan yang relatif rendah disebabkan faktor budaya yang membatasi ruang geraknya dalam berorganisasi; dan 4). belum dikenalnya keberadaan kopwan dikalangan masyarakat. Solusi menggerakkan denyut nadi kopwan menghadapi era globalisasi adalah melalui pemberdayaan kopwan oleh kaum perempuan sendiri secara profesional, otonom dan mandiri dalam arti berkemampuan mengelola usaha sebagaimana layaknya badan usaha lain, koperasi juga harus mampu mengoptimalkan potensi ekonominya, serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholders dengan tetap mendapat dukungan pemerintah dalam rangka pengendalian perilaku ekonomi. Dengan semakin besarnya peluang bagi kaum perempuan dan meningkatnya jumlah kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif, perlu dipertimbangkan untuk menumbuhkan kopwan-kopwan baru yang otonom dan mandiri. Untuk itu perlu : 1). dimotivasi melalui pendidikan, 2). sosialisasi dalam rangka pengembangan sosial kapital kelompok perempuan, 3). membangun sistem pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, 4). memacu pengembangan usaha produktif, 5). menumbuhkan jiwa kewirakoperasian serta 6). mempermudah mekanisme pendirian kopwan.

Kata kunci: Tumbuh kembangkan kopwan otonom, mandiri dan profesional; eksis di era globalisasi

I. PENDAHULUAN

Gema globalisasi perekonomian dunia yang ditandai dengan dunia tanpa batas (borderless World) dan terbukanya pasar bebas membuka peluang bisnis bagi sebagian kalangan, tetapi juga menumbuhkan kesulitan dari kalangan lainnya. Para penganut ekonomi pasar bebas sangat yakin dan berargumentasi bahwa konsep persaingan terbuka ini akan memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat di semua tempat, berupa pendistribusian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang proporsional. Argumentasi ini mendapat penolakan dari ekonom lainnya yang secara nyata telah melihat dampak negatif dari konsep tersebut, karena persaingan sengaja dibuka dalam kondisi ketidakseimbangan pemilikan faktor produksi, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia. Terlepas dari perdebatan kedua kubu yang pro dan yang kontra terhadap globalisasi, perlu dipertanyakan apakah pelaku ekonomi di Indonesia telah siap menghadapi kondisi persaingan

*) Kepala Bidang Perkaderan, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

***) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

yang semakin ketat, sedangkan diketahui sampai sekarang ini kondisi perekonomian nasional masih diwarnai oleh ketimpangan dalam penguasaan aset-aset produktif, serta kemiskinan, pengangguran yang sangat besar.

Dalam menghadapi era globalisasi, sebanyak 189 negara yang tergabung dalam Dewan Milenium, pada September 2000 di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati suatu kerangka pembangunan global untuk perbaikan dan pencapaian kehidupan masyarakat dunia yang layak. Kerangka tersebut dituangkan dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals, MDGs). Isi dari MDGs identik dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tiga dari delapan tujuan pembangunan milenium yang dideklarasikan adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta menjamin keberlangsungan lingkungan hidup (Kusmuljono, 2007).

Dalam konsep MDGs Indonesia termasuk dalam kategori miskin. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada akhir tahun 2005 adalah sebanyak 15%. Pada akhir tahun 2006 BPS dengan segala bentuk Justifikasinya menyatakan orang miskin bertambah menjadi 17,5% dari rakyat Indonesia, sedangkan Bank Dunia pada Bulan Agustus 2006 secara tegas mengumumkan bahwa lebih dari seratus juta rakyat Indonesia tergolong miskin. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta orang diantaranya adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah Rp. 10 ribu perhari.

Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal antara lain adanya keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi, berorganisasi dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Budaya tradisional yang berideologi patriarki dimana adanya ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang menghantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya, sebagian kaum perempuan melibatkan diri dalam berbagai usaha yang produktif ada pula yang bergabung dalam wadah memiliki legalitas seperti koperasi. Koperasi menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri.

Lebih dari 800 juta orang diseluruh dunia sudah menjadi anggota koperasi. Meskipun koperasi lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya, mereka juga bekerjasama dan terkait secara global. Mereka sama-sama mendukung dan mempraktekkan nilai maupun prinsip yang terkandung dalam ICIS (Pernyataan Internasional tentang Jatidiri Koperasi). Basis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi yang unik menempatkan koperasi sebagai lembaga ideal yang berperan untuk meningkatkan kelayakan globalisasi. Sesuatu yang telah mereka praktekkan selama beberapa generasi. Dalam banyak hal koperasi adalah cermin dan lebih menampilkan wajah kemanusiaan dari globalisasi yang mementingkan uang dan modal semata-mata. (Wagiono Ismangil, 2007). Bukan tidak mungkin untuk menghadapi era persaingan pasar bebas pengembangan peran perempuan melalui koperasi wanita (kopwan), akan menjadi salah satu titik balik yang menjadikan era globalisasi sebagai pembukaan

kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjukkan eksistensi dalam kancah perekonomian dunia. Untuk itu perlu dipertanyakan sejauhmana potensi dan apa yang akan dilakukan kopwan agar bertahan dalam era globalisasi yang diwarnai oleh persaingan efisiensi dan profesionalisme pelaku bisnis dan apakah sesungguhnya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkembangkan kopwan dalam memberdayakan kaum perempuan dalam potensi ekonomi.

II. POTENSI DAN TANTANGAN BAGI KOPERASI WANITA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

1. Potensi Kopwan

Dengan adanya era otonomi daerah, menyebabkan terputus hubungan struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam memantau perkembangan kopwan di Indonesia. Data perkembangan kopwan yang dapat dilaporkan adalah data tahun 2000 dan data yang paling mutakhir adalah data tahun 2006 yang merupakan hasil Kajian Pendataan Kopwan yang Responsif Gender di Indonesia oleh Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK. Dari data tersebut, dapat dikemukakan bahwa secara kuantitatif perkembangan kopwan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti peningkatan jumlah kopwan aktif, jumlah karyawan dan manager, permodalan dan volume usahanya.. Sementara jika dilihat dari kualitas, kopwan cenderung lebih konsisten dan memberikan dampak positif yang lebih luas yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga dibandingkan jenis koperasi lainnya..

Tabel 1. Rekapitulasi Keragaan Kopwan di Indonesia

Uraian	Satuan	Tahun 2000 *)	Tahun 2006**)
Jumlah Kop. Di Indonesia	Unit	102,227	132,965
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	88,206	94,449
Jumlahh Kopwan Aktif	Unit	1,256	1,517
Jumlah Anggota Kopwan	Org	366,194	220,740
Jumlah Manager & Karyawan Kopwan	Org	1,589	2,094
Modal Sendiri Kopwan	Rp. Juta	153,896.84	426,056.20
Modal Luar Kopwan	Rp. Juta	26,379.14	405,507.29
Volume Usaha Kopwan	Rp. Juta	142,861.00	1,401,000.00
SHU Kopwan	Rp. Juta	6,605.89	118,000.00

Keterangan :

*) Data dari Rekapitulasi Data Kopwan Berdasarkan Jenis Per 31 Desember 2000, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

***) Hasil Pendataan Kopwan yang Responsif Gender Tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Keragaan kopwan di Indonesia berdasarkan analisis data kajian kopwan tahun 2006, adalah sebagai berikut :

- 1). Dari 1,517 unit kopwan aktif, ternyata 52% telah melaksanakan RAT dan 48% tidak melaksanakan RAT dan tidak memberikan data. Temuan tersebut mengindikasikan lemahnya kinerja Kopwan serta lemahnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di propinsi dan kabupaten/kota dalam memantau perkembangan Kopwan.
- 2). Kegiatan usaha kopwan yang terbanyak adalah di bidang simpan pinjam (65%), serba usaha (23%) dan produksi/konsumsi (5%) dan sebanyak 8% tidak memberikan data.
- 3). Apabila dilihat dari jumlah anggota kopwan, diperoleh gambaran bahwa rata-rata jumlah anggota kopwan 205 orang perkoperasi. Dari jumlah kopwan aktif 1,517 unit tersebut, 71%nya beranggotakan \leq 160 orang (berarti dibawah jumlah rata-rata 205 orang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kopwan yang berhasil di Indonesia menjadi besar atau layak secara organisasi (dilihat dari keaktifan anggota yang terlibat didalam koperasi) adalah relatif masih sedikit/kecil jumlahnya.
- 4). Dalam hal kontribusi anggota dalam pembentukan modal sendiri, ternyata cukup besar kontribusi anggota kopwan dalam memupuk modal sendiri mencapai 51,24%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja usaha kopwan di Indonesia cukup baik.
- 5). Secara rata-rata volume usaha perkopwan adalah Rp. 1,856 juta, sedangkan total modal rata-rata yang dimiliki kopwan cukup besar nilainya yaitu Rp. 547,792 juta padahal SHU rata-rata perkopwan hanya Rp. 172 juta (11%). Data tersebut menunjukkan masih lemahnya pengelolaan usaha karena belum ditangani kopwan secara profesional sehingga akumulasi keuntungan yang diperoleh masih relatif kecil.
- 6). Jumlah karyawan dan manager kopwan 2,094 orang terdiri dari 1,910 orang perempuan (91,21%) dan laki-laki 184 orang (0,70%). Diluar itu kopwan mempekerjakan orang yang bekerja paruh waktu yang diduga jumlahnya lebih besar dari tenaga tetap. Kurangnya partisipasi dan kontribusi anggota terhadap kegiatan koperasi tersebut akan mempengaruhi kinerja usaha kopwan.

Dari keragaan kopwan tersebut diatas terlihat adanya, indikasi bahwa kinerja organisasi dan bisnis kopwan ternyata masih cukup rendah, hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kemampuan kopwan dalam pengembangan kapabilitas usahanya agar dapat bertahan di era globalisasi.

Berdasarkan analisis jumlah kopwan dibandingkan jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2000 dan 2006 terlihat bahwa rasionya relatif sangat kecil yaitu 1,61% (tahun 2006).

Sedikitnya jumlah kopwan mengungkapkan bahwa : (1). Ternyata kaum perempuan masih sulit mendapatkan akses ekonomi terkait adanya issue gender, (2). Masih banyak perempuan yang belum paham atau belum mengenal koperasi, (3). Masyarakat/perempuan belum merasakan dampak keberhasilan kopwan yang ada di lingkungannya.

Sesuai RPJM 2005 dimana ditargetkan perwujudan 70,000 unit koperasi berarti ada tantangan bagi pemerintah untuk menumbuhkan dan memantapkan koperasi tidak terkecuali kopwan. Prioritas pada pemberdayaan kopwan juga bisa dilihat dari kenyataan bahwa kopwan cenderung lebih konsisten dibandingkan jenis koperasi lainnya, dan kopwan dapat menumbuhkan antara lain kelompok usaha masyarakat yang produktif dan potensial, karena keberadaan kelompok tersebut cukup banyak.

Jumlah kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif binaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dari tahun 2004-2006 adalah sebanyak 184 kelompok di 32 propinsi yang mendapatkan bantuan perkuatan modal usaha berbentuk dana bergulir melalui koperasi (KSP/USP) dengan pola tanggung renteng seperti terlihat pada Tabel 2.

Pada tahun 2007 Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan memberikan bantuan perkuatan modal usaha kepada satu kelompok tanggung renteng melalui satu KSP/USP per propinsi sebesar Rp. 22,500,000,-. Kelompok tanggung renteng dimaksud merupakan kelompok usaha produktif yang utamanya terdiri dari perempuan (1 kelompok terdiri dari 15 orang). Diharapkan ke depan dapat dikembangkan menjadi wadah koperasi tersendiri atau menjadi anggota koperasi yang telah ada.

Tabel 2. Perkembangan Kelompok Tanggung Renteng Diutamakan Terdiri dari Perempuan Penerima Dana Bergulir Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender

Tahun Penerimaan	Jumlah Propinsi	Jumlah KSP/USP	Jumlah Kelompok Tanggung Renteng	Jumlah Dana Bergulir (Rp.000)
2004	30	30	30	225,000
2005	29	29	58	435,000
2006	32	32	96	720,000
Jumlah		91	184	1,380,000

Sumber data : Perkemb. dana KSP/USP dan kelompok tanggung renteng penerima dana bergulir, Sekretariat Kementerian Negara Koperasi dan UKM (diolah).

Sedangkan keberadaan kelompok usaha masyarakat yang produktif dan potensial binaan institusi lain adalah sebanyak 41,962 kelompok usaha masyarakat yang produktif yang tersebar di 19 propinsi dan direncanakan dikonversi menjadi 3,000 unit koperasi baru pada tahun 2006-2008 seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Pembentukan Koperasi Baru dari Kelompok Usaha Masyarakat (binaan institusi lain) Tahun 2006 – 2008

Nama Kelompok dan Instansi yang Membina	Jml Kelompok yang Ada*)	Pembentukan Koperasi Baru			Jumlah
		2006	2007	2008	
1. KUBE (Depsos)	8.849	9	64	100	173
2. P2KP (Dep. PU)	924	5	31	40	76
3. PEMP (DKP)	1.228	7	26	30	63
4. PPK (Depdagri)	6.533	2	123	200	325
5. P4K (Deptan)	8.717	10	136	200	346
6. UPPKS (BKKBN)	11.361	21	61	100	182
7. Lain-lain (organisasi kemasyarakatan)	4.370	146	359	1.330	1.835
Jumlah	41.962	200	800	2.000	3.000

Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan

*) Data dari 19 Propinsi

Adanya kelompok usaha masyarakat maupun kelompok perempuan produktif merupakan salah satu peluang bagi pengembangan koperasi baru. Berbicara mengenai koperasi baru yang dibentuk dari kelompok masyarakat, maka pada tahun 2005-2007 telah terbentuk 1,555 unit koperasi baru di 11 propinsi, dimana 124 unit (7.97%) adalah kopwan baru pada 6 propinsi (Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) seperti terlihat pada Tabel 4.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosentase terbentuknya kopwan baru tetap relatif masih kecil, dibandingkan pembentukan koperasi jenis lainnya. Sehubungan dengan itu, perlu dipikirkan bagaimana memotivasi masyarakat khususnya perempuan untuk membentuk kopwan.

Tabel 4. Realisasi Pembentukan Koperasi Baru dari Kelompok Masyarakat Tahun 2005-2007

No	Propinsi	Koperasi Baru	Kopwan Baru	Jumlah
1.	Sumatera Barat	11	2	13
2.	Riau	17	1	18
3.	Bangka Belitung	6	-	6
4.	Banten	1	-	1
5.	Jawa Barat	932	21	953
6.	Jawa Timur	104	70	174
7.	Kalimantan Barat	81	26	107
8.	Kalimantan Tengah	158	-	158
9.	Kalimantan Timur	59	-	59
10.	Sulawesi Selatan	1	4	5
11.	Sulawesi Tengah	61	-	61
	Jumlah	1.431 (92.03%)	124 (7.97%)	1.555

Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan berdasarkan laporan daerah

2. Masalah dan Tantangan Kopwan

Masalah dan tantangan yang dihadapi kopwan adalah sebagai berikut :

- 1). Akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah
Adopsi teknologi pada beberapa kopwan masih relatif rendah, khususnya dalam penerapan sistem administrasi dan keuangan yang masih dilakukan secara konvensional. Demikian pula dalam hal informasi pasar masih tertinggal jauh sehingga sulit bersaing dengan pengusaha lainnya.
- 2). Akses terhadap sumber permodalan masih rendah
Berdasarkan pengamatan dan penelitian di beberapa kopwan tahun 2006, pada kenyataannya cukup banyak kopwan yang lebih mengandalkan modal sendiri. Mereka cukup puas dan pasrah berusaha hanya dengan mengandalkan modal yang dipupuk sendiri, walaupun sebenarnya membutuhkan tambahan modal. Meskipun demikian, masih ada beberapa kopwan yang masih mengharapkan bantuan modal dari pihak luar. Misalnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah banyak memberikan bantuan perkuatan kepada kopwan maupun kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif antara lain melalui Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) dan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender. Namun program bantuan perkuatan dana dari pemerintah sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena terbatasnya jumlah dana. Akibatnya kopwan tidak mudah mendapatkan akses terhadap permodalan.
- 3). Kapasitas sumberdaya manusia masih rendah
Faktor budaya menjadi salah satu kendala rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan juga menyebabkan perempuan tidak diberi kesempatan untuk terlalu banyak aktif dalam berorganisasi. Hal tersebut mengakibatkan mereka banyak yang menjadi tenaga paruh waktu dalam koperasi. Dengan terbatasnya kapasitas sumberdaya perempuan akan berpengaruh pula dalam akses informasi pasar dan teknologi. Sehingga mengakibatkan kopwan kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain.
- 4). Keberadaan kopwan belum cukup dikenal apalagi mengakar di kalangan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa kelompok perempuan, ternyata sebagian daripada kelompok perempuan tersebut tidak tahu akan keberadaan dan peran koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan bantuan dalam berbagai aspek perekonomian. Ada sebagian kelompok perempuan lainnya yang takut ikut berorganisasi karena mereka menduga bahwa keikutsertaannya harus membayar sejumlah uang.

III. UPAYA MENGERAKAN DENYUT NADI KOPWAN

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan pasar bebas tidaklah selalu buruk, bahkan menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi termasuk kopwan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, seperti adanya informasi yang lebih terbuka, semua pihak dapat bebas mendapatkan akses informasi, persaingan lebih fair dan adil, serta akses teknologi mudah terjangkau dan biayanya pun murah.

Agar kopwan dapat bertahan dalam menghadapi era globalisasi perlu diupayakan pemberdayaan kopwan oleh kaum perempuan sendiri secara profesional yang otonom dan mandiri dalam arti berkemampuan mengelola usaha sebagaimana layaknya badan usaha lain. Dalam era globalisasi kopwan juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama, saling menghargai, menghormati antar koperasi, dan seluruh stakeholder lainnya dengan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Regulasi peraturan pemerintah diperlukan apabila terjadi kesalahan di pasar sebagai akibat adanya kecurangan dari para pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah atau pasar bergerak kearah munculnya persaingan tidak sehat. Intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan (proteksi) diperlukan dalam rangka mengendalikan perilaku ekonomi, bukan pranata ekonomi (Mohammad Iqbal, 2004).

Untuk memperkuat karakter bisnis kopwan, program pendidikan dan sosialisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi dan praktek bisnis kopwan. Pendidikan dan sosialisasi dibutuhkan untuk merubah mind-set, meningkatkan kualitas dan kompetensi, manajerial dan bagaimana membangun jaringan serta memperkenalkan citra koperasi dan program konversi atau pembentukan koperasi beserta konsekuensi (biaya) yang ditimbulkannya.

Dalam rangka pengembangan kapabilitas usaha kopwan agar bertahan di era globalisasi dibutuhkan pula pendampingan yang dapat memperbaiki manajemen usaha, kualitas produk dan pengembangan pasar. Lembaga pendampingan seperti BDS/LPB (Business Development Services/Lembaga Pengembangan Bisnis) dan inkubator perlu diberdayakan kembali oleh pemerintah, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai tenaga konsultan yang sangat dibutuhkan UKM dan Koperasi.

Sebagian besar kopwan yakni sebanyak 65%nya memiliki jenis Usaha Simpan Pinjam (USP) yang memberikan pelayanan pinjaman kredit untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak maupun kebutuhan modal usaha bagi anggotanya. Keberadaan KSP/USP yang dikelola oleh kaum perempuan tersebut cukup signifikan manfaatnya bagi anggota demikian pula terhadap dukungan penghasilan bagi lembaga koperasinya. Namun demikian, agar tetap eksis perlu dilaksanakan : (1). Pembinaan kembali kinerja KSP/USP, (2). Penetapan pengelolanya harus benar-benar memiliki kemampuan dan kemahiran profesional dibidang keuangan mikro, (3). Perlu dipertimbangkan adanya badan atau tenaga fungsional khusus ditingkat daerah yang mamantau dan mengawasi kesehatan

kopwan yang memiliki USP mengingat bidang usaha memiliki kekhususan seperti bank, (4). Serta perlu dukungan dari kalangan perbankan sebagai mitra KSP/USP.

Dalam hal pembentukan koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah membuat Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, dimana pendirian koperasi tidak sekedar cukup ditandatangani oleh 20 orang dan pengesahan dari Dinas Koperasi setempat tetapi juga harus dicatat dalam akte resmi, notariat (Untung Tri Basuki, Tahun 2005). Implikasi dari MoU tersebut tentulah antara lain timbulnya dana untuk akte notaris koperasi. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap beberapa perempuan yang terlibat didalam kelompok usaha yang produktif, maka mereka mengeluhkan adanya akte notaris didalam pendirian koperasi dan bagaimana pembiayaannya, hal tersebut akan memberatkan.

Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi yang tidak kondusif tersebut antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pembina maupun masyarakat. Apabila kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan fokus, maka diharapkan dapat memotivasinya untuk dikembangkan menjadi wadah koperasi. Demikian juga perlu dipertimbangkan adanya kemungkinan memasukkan biaya pengurusan akte notaris dalam paket bantuan perkuatan yang diberikan kepada koperasi dan UKM.

Khususnya mengenai pendidikan dan sosiliasiasi kegiatan ini perlu diadakan dalam rangka pengembangan sosial kapital kelompok perempuan, membangun sistem pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, memacu pengembangan usaha produktif, menumbuhkan jiwa kewirakoperasian, dan mekanisme pembentukan kopwan.

IV. KESIMPULAN

- 1). Dengan adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan “borderless word” dan kebebasan pasar, maka peluang akan informasi lebih terbuka, persaingan lebih fair, dan akses teknologi pasar, modal juga akan mudah terjangkau dan biayanya murah.
- 2). Kopwan harus memanfaatkan peluang tersebut agar dapat eksis di era globalisasi dengan terlebih dahulu mengetahui tentang potensi dan permasalahan/tantangan yang dihadapinya.
- 3). Permasalahan yang dihadapi kopwan antara lain : (1). akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah; (2). sumber permodalan juga masih rendah; (3). kapasitas SDM perempuan yang relatif rendah dikarenakan masih adanya kendala struktural budaya menyebabkan perempuan dibatasi gerakannya dalam berorganisasi dan menjadi lambatnya akses informasi dan teknologi; (4). belum dikenalnya keberadaan kopwan dikalangan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kinerja organisasi dan bisnis kopwan menjadi cukup rendah, yang berimplikasi terhadap kemampuan

- kopwan dalam pengembangan kapabilitas usahanya agar mampu bertahan di era globalisasi.
- 4). Sebagian besar kopwan yaitu sebanyak 65% dari jumlah kopwan di Indonesia adalah merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang keberadaannya cukup signifikan manfaatnya bagi anggota demikian pula terhadap dukungan penghasilan bagi lembaga koperasinya. Agar eksis dalam era globalisasi perlu pembenahan/perbaikan terhadap kinerja koperasi sehingga menjadi mandiri dan otonom yang berkemampuan sendiri mengelola usaha simpan pinjam sebagaimana layaknya badan/Lembaga Keuangan Mikro lainnya dan perlu dipertimbangkan perlunya kebijakan adanya suatu badan/lembaga/tenaga fungsional KSP/USP.
 - 5). Solusi menggerakkan denyut nadi kopwan menghadapi era globalisasi adalah melalui pemberdayaan kopwan oleh kaum perempuan sendiri secara profesional yang otonom dan mandiri dalam arti berkemampuan mengelola usaha sebagaimana layaknya badan usaha lain dan mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholders dengan tetap mendapat dukungan pemerintah dalam rangka pengendalian perilaku ekonomi. Dengan adanya peluang meningkatnya jumlah kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif dipertimbangkan ditumbuhkan menjadi kopwan baru yang otonom dan mandiri. Dalam rangka memotivasinya, diperlukan pendidikan dan sosialisasi untuk antara lain pengembangan sosial kapital kelompok perempuan, membangun sistem pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, memacu pengembangan usaha produktif, menumbuhkan jiwa kewirakoperasian serta mekanisme pendirian kopwan dan konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2006). *Perkembangan Koperasi*, Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi NTB dan Sumsel.
- B.S. Kusmuljono, (2007). *Peran Keuangan Mikro dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi Perempuan*, makalah disampaikan pada Rakor Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Jakarta Tanggal 28 Maret 2007.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2006), *Laporan Akhir Pendataan Koperasi Wanita yang Responsif Gender*. Jakarta
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (2007). *Pembentukan Koperasi dan Kelompok Usaha Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Focal Point PUG Bidang KUKM Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 7 Juni 2007.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2006). *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan*. Jakarta
- Mohammad Iqbal, (2004). *Era Baru Koperasi Indonesia*, Penerbit Pusat Pengkajian Koperasi Madani Jakarta.

- Nani Zakaria, (2006). *Melalui Usaha Mikro dan Kecil*, makalah disampaikan pada Diskusi Aspek Strategis di Jakarta Tanggal 20 Nopember 2006.
- Robby Tulus, (2004). *Transnational Cooperatives*, makalah disampaikan pada Seminar Koperasi dalam Era Globalisasi di Jakarta Tanggal 18 Desember 2004.
- Untung Tri Basuki, (2005). *Akte Notaris Koperasi Jangan Jadi Beban Masyarakat*, Artikel Majalah Gema No. 01/Edisi Khusus/tahun XVI/2005.
- Wagiono Ismangil, (2004). *Strategic Alliancis*, makalah disampaikan pada Seminar Koperasi dalam Era Globalisasi di Jakarta Tanggal 18 Desember 2007.